Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif (*SMART GOVERNANCE*)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	❖ Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ❖ Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah ❖ Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti ❖ Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 3. Rekonsiliasi Temuan Hasil Pemeriksaan (*Non Bugdegting*) 4. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan (*Non Bugdegting*)	1. 29 PD dan 4 OP (RKPD, KUA PPAS, RKPD-P, KUA PPAS-P) 2. 29 PD 3. 2 Laporan 4. 2 Laporan
	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang	❖ Indeks opini BPK atas LKPD		5. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	5. 29 PD
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang	❖ Indeks RB Kota Bontang ❖ Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM		1. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang(*Non Bugdegting)*	1. 1 Laporan 2. 2 Laporan
Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang	❖ Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori "Memuaskan"	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2. Monitoring dan Implimentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) *(Non Bugdegting)* 3. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	2. 2 Laporan 3. 12 Laporan
	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif	❖ Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan	4. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	4. 5 Kasus
	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang	❖ Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP pada level 3	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	5. 1 Laporan
	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang	❖ Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang ❖ Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah ❖ Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan ❖ Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah		1. Kegiatan *Non Budgeting* 2. Kegiatan *Non Budgeting* 3. Kegiatan *Non Budgeting* 4. Kegiatan *Non Budgeting*	1. 1 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. 4 Laporan
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, profesional dan modern	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional	❖ Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 6. Peningkatan Kinerja Aparatur 7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	21. 22 APIP 22. 39 PNS 23. 2 Semester
	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan	❖ Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah		8. Kegiatan *Non Bugdegting*	8. 1 Laporan
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi	❖ Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK ❖ Jumlah utilitas aset kondisi baik		9. Kegiatan *Non Bugdegting*	9. 1 Laporan
	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif	❖ Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG) ❖ Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah ❖ Capaian fisik Renja Inspektorat Daerah dengan kategori "Baik"	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 12. Penyediaan Alat Tulis Kantor 13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14. Penyediaan Makanan dan Minuman 15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 16. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10. 50 Surat 11. 20 Unit 12. 4 Bagian 13. 4 Bagian 14. 1 Tahun 15. 3 IP Prov. Kaltim, 6 IP Pusat 16. 2 Semester 17. 11 Jenis 18. 3 Jenis 19. 21 Unit 20. 5 Jenis
				21. Kegiatan *Non Bugdeting* 22. Kegiatan *Non Bugdeting* 23. Kegiatan *Non Bugdeting*	21. 22 APIP 22. 39 PNS 23. 2 Semester